

Evaluasi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai Upaya Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Kelurahan Petemon Kecamatan Sawahan Kota Surabaya

Isnatul Huda

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Achluddin Ibnu Rochim

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Indah Murti

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Korespondensi penulis: isnatulhuda896@gmail.com

Abstract: *In an effort to improve the community's economy in Petemon Village, Sawahan Subdistrict, Surabaya City, this research analyzes the empowerment of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). The results show that although programs to encourage MSMEs exist, their implementation is not optimal. One of the problems found is the lack of coordination between related agencies, the lack of training and capital distributed for MSMEs, and the lack of monitoring the growth of MSMEs. According to this study, although efforts have been made to support the applicable laws, the implementation of the program needs to be improved, especially in terms of fair distribution, effective socialization, and assistance that suits the needs of MSMEs.*

Keywords: *Policy Evaluation, MSMEs, Economic Empowerment*

Abstrak: Dalam upaya untuk menunjang ekonomi masyarakat di Kelurahan Petemon, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, penelitian ini menganalisis pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun program untuk mendorong UMKM ada, implementasinya tidak optimal. Salah satu masalah yang ditemukan adalah kurangnya koordinasi antar instansi terkait, kurangnya pelatihan dan modal yang dibagikan untuk UMKM, dan kurangnya pemantauan pertumbuhan UMKM. Menurut penelitian ini, meskipun upaya telah dilakukan untuk mendukung undang-undang yang berlaku, implementasi program perlu diperbaiki, terutama dalam hal distribusi yang adil, sosialisasi yang efektif, dan bantuan yang sesuai dengan kebutuhan MSME.

Kata kunci: Evaluasi Kebijakan, UMKM, Pemberdayaan Ekonomi

LATAR BELAKANG

Saat ini, bidang UMKM memegang peranan penting dalam perekonomian nasional. Hal ini dibuktikan dengan beberapa peristiwa yang menghantam perekonomian Indonesia, seperti krisis mata uang tahun 1998 dan pandemi COVID-19. Terdapat 67 juta usaha kecil dan menengah yang menyumbang 61 persen produk domestik bruto (PDB) dan menyerap tenaga kerja sekitar 100 juta orang, seperti dikutip Portal Informasi Indonesia pada September 2023, berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah disebutkan ada 17 juta orang. Negara ini mempunyai potensi untuk mempekerjakan 97% dari total angkatan kerja nasional. (Sulastri, 2022)

Di Indonesia, peraturan yang mengatur usaha kecil dan menengah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Kecil dan Menengah (UU UMKM),

(Rahmat et al., 2008) yang tujuan utamanya adalah menciptakan keseimbangan, mengembangkan dan Mewujudkan usaha yang adil. Bagaimana struktur perekonomian perekonomian nasional. Dalam konteks ini, UKM diperkuat sebagai bagian integral perekonomian nasional yang mempunyai posisi, peran, dan potensi yang strategis. Pemberdayaan usaha kecil dan menengah dilakukan dengan menciptakan lingkungan yang mendukung dan memberikan peluang usaha, dukungan, perlindungan dan pengembangan usaha sedapat mungkin. Tujuannya adalah untuk meningkatkan posisi, peran, dan potensi usaha kecil dan menengah dalam meningkatkan ekonomi, pemerataan pendapatan, dan penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan. Mengkaji pemberdayaan usaha kecil dalam konteks ini membantu memahami efektivitas strategi pemerintah untuk memperkuat perekonomian masyarakat dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan perluasan lebih lanjut.

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro mengisyaratkan bahwa kebijakan dan regulasi pemerintah harus meningkatkan kesadaran akan pentingnya UMKM agar dapat tumbuh dan berkembang. (Daerah, 2021)

Surabaya sendiri telah menganut perekonomian dimana setiap kebutuhan Kota Surabaya dipenuhi oleh usaha kecil dan menengah. Wali Kota Eli Chahyadi menjelaskan, kunci keberhasilan Kota Surabaya dalam menghadapi tantangan ekonomi yang terjadi selama pandemi COVID-19 adalah diperkenalkannya perekonomian nasional. Pengenalan perekonomian nasional yang dilakukan Wali Kota Eli Chahyadi berarti peningkatan kualitas produk toko eceran dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Surabaya. Selain bantuan berupa dana, fasilitas, program pelatihan hingga progra padat karya diciptakan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bukan hanya itu usaha pemerintah Kota Surabaya juga dengan memanfaatkan platform digital salah satunya seperti aplikasi E-Peken Surabaya, bahkan, pemerintah Kota Surabaya akan menawarkan bantuan keuangan kepada usaha kecil dan menengah (UMKM) yang ingin mendaftarkan Kekayaan Intelektual (KI) mereka di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Hal ini dilakukan untuk mencegah barang yang dibuat oleh UMKM di Kota Surabaya tidak dibajak oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. (Surabaya, 2022)

Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai pilar ekonomi kota memengaruhi pertumbuhan ekonomi Surabaya. Untuk mendukung UMKM, pemerintah Kota Surabaya telah meluncurkan beberapa kebijakan, termasuk revitalisasi pasar rakyat, yang telah membenahi secara fisik yaitu sekitar 5.352 pasar rakyat di Indonesia. Revitalisasi ini

diperlukan untuk memberikan tempat yang aman dan nyaman bagi UMKM dan pedagang pasar rakyat untuk memasarkan produk unggulan daerah serta mendukung kelancaran logistik. Pembiayaan untuk UMKM melalui program-program keuangan dan pemberdayaan UMKM melalui pelatihan juga telah ada di Kota Surabaya namun masih ada beberapa kendala yang dialami oleh masyarakat pelaku UMKM di Kelurahan Petemon Kecamatan Sawahan antara lain rendahnya pangsa pasar, kesulitan meningkatkan kualitas produk, kualitas manajemen usaha yang masih rendah dan pengelolaan sumber daya yang kurang efisien, pada aspek permodalan terdapat pendanaan yang terbatas sehingga mempengaruhi kinerja usaha mereka yang secara tidak langsung juga mempengaruhi perekonomian mereka, kendala lainnya adalah kurangnya komunikasi dari pihak Kelurahan kepada masyarakat yang mengakibatkan pemberdayaan UMKM tidak merata.

Maka dari itu ada beberapa alasan mengapa evaluasi pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah perlu dilakukan untuk:

- 1) Meningkatkan Efektivitas Program: Evaluasi pemberdayaan UMKM membantu mengetahui seberapa efektif program pemberdayaan yang dilakukan. Akibatnya, program dapat disesuaikan dan ditingkatkan untuk mencapai tujuan yang lebih baik.
- 2) Meningkatkan Kesadaran dan Kemampuan Pelaku UMKM: Evaluasi pemberdayaan UMKM membantu pelaku UMKM menjadi lebih sadar dan memiliki lebih banyak kemampuan untuk mengembangkan bisnis mereka sendiri. Akibatnya, pelaku UMKM memiliki jalur yang lebih mudah ke sumber daya keuangan dan kinerja bisnis mereka meningkat.
- 3) Meningkatkan Kesadaran dan Kemampuan Pemerintah: Evaluasi pemberdayaan UMKM membantu meningkatkan kesadaran dan kemampuan pemerintah tentang cara mengembangkan program pemberdayaan UMKM. Akibatnya, pemerintah lebih mudah mendapatkan sumber daya keuangan dan program pemberdayaan UMKM lebih baik beroperasi.
- 4) Meningkatkan kesadaran dan kemampuan stakeholder: Penilaian pemberdayaan usaha kecil dan menengah (UMKM) membantu meningkatkan kesadaran dan kemampuan stakeholder.

KAJIAN TEORITIS

Dalam proses pengambilan kebijakan, evaluasi ini berguna untuk pengambilan kebijakan karena memberikan wawasan yang sebanding dengan kebijakan mengenai perbedaan antara kinerja kebijakan yang diharapkan dan apa yang sebenarnya dicapai. Analisis tidak hanya menentukan seberapa jauh masalah yang terjadi telah diselesaikan, tetapi juga

menjelaskan dan mengkritik prinsip-prinsip yang membentuk kebijakan, mendukung perubahan dan reformulasi permasalahan. Tujuan melakukan evaluasi adalah untuk memahami sifat tujuan kebijakan, pelaksanaannya, dan dampak yang dicapai.

William N. Dunn menjelaskan istilah "evaluasi" dengan interpretasi. Evaluasi numerik dan verbal berfungsi sebagai cara untuk memperoleh hasil kebijakan berdasarkan unit nilai. Secara khusus, evaluasi adalah tentang menghasilkan informasi tentang nilai dan kegunaan hasil-hasil kebijakan. Suatu kebijakan atau program dapat dikatakan telah mencapai tujuannya apabila hasil yang dicapai oleh kebijakan tersebut konsisten dengan prinsip yang ada. Maka sebab itu, kebijakan atau program tersebut telah menghasilkan tingkat efektivitas yang signifikan, artinya berbagai permasalahan kebijakan telah terselesaikan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, yaitu metode penelitian yang memahami dan menjelaskan fenomena dan situasi. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti wawancara, observasi, dan dokumenter, serta menganalisis dan mendeskripsikannya. Hasil penelitian ini diperoleh berupa deskripsi naratif yang menggambarkan situasi dan kondisi yang diteliti. Jenis penelitian deskriptif kualitatif digunakan untuk memperoleh data yang lebih rinci berdasarkan data yang ada. Penulis kemudian secara sistematis, obyektif, dan akurat menguraikan atau menyajikan fakta, ciri, dan hubungan antar fenomena yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Melalui hasil wawancara, observasi dan pembahasan yang dilaksanakan dalam penelitian terkait evaluasi pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sebagai upaya menaikkan perekonomian masyarakat di kelurahan petemon dengan analisis menggunakan teori dari (*William N. Dunn - (2003)*, n.d.) menghasilkan pembahasan yang akan dijabarkan dibawah ini. Teori ini memiliki 6 indikator, dan hasil penelitian akan dibahas dibawah ini:

1. Efektivitas

Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh peneliti pemberdayaan UMKM di Kelurahan Petemon belum efektif karena hasil yang diharapkan yaitu peningkatan pengetahuan, partisipasi, dan peningkatan profitabilitas UMKM belum tercapai, layanan yang dihasilkan dari program ini masih rendah, dan peningkatan ekonomi yang dihasilkan belum signifikan serta ada kekurangan dalam proses sosialisasi dan distribusi informasi yang menunjukkan kurangnya pendekatan dalam pelaksanaan program.

2. Efisien

Hasil yang diperoleh dari analisis peneliti yaitu pemberdayaan UMKM di Kelurahan Petemon dapat dikatakan belum efisien meskipun ada umkm yang menerima bantuan dana tetapi banyak pelaku UMKM yang merasa tidak mendapatkan cukup informasi ataupun bantuan, menunjukkan bahwa koordinasi dan usaha yang digunakan belum efisien.

3. Kecukupan

Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh peneliti pemberdayaan UMKM di Kelurahan Petemon belum optimal dalam memenuhi kebutuhan dan nilai pelaku UMKM karena upaya distribusi bantuan yang kurang terorganisir dan tidak adanya akses terhadap pelatihan serta kurangnya koordinasi yang membahas tentang perkembangan dan kebutuhan UMKM.

4. Pemerataan

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti pemberdayaan UMKM di Kelurahan Petemon masih belum optimal dalam distribusi bantuan, dengan monitoring yang kurang efektif menyebabkan pelaku UMKM belum mendapatkan dukungan yang sesuai sehingga masih kurang memenuhi rasionalitas legal dan sosial.

5. Responsivitas

Berdasarkan analisis menggunakan kriteria responsivitas pemberdayaan UMKM di Kelurahan Petemon masih belum optimal perlu adanya perbaikan dalam proses pendataan dan penanganan kebutuhan UMKM.

6. Ketepatan

Berdasarkan analisis menggunakan kriteria ketepatan pemberdayaan UMKM di Kelurahan Petemon telah mengacu pada kepada kebijakan yang ada dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi masih memiliki ruang untuk diperbaiki agar dapat mencapai tingkat ketepatan yang lebih baik dalam pemberian bantuan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Evaluasi Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Sebagai Upaya Peningkatan Perekonomian Masyarakat di Kelurahan Petemon Kecamatan Sawahan Kota Surabaya dengan menerapkan teori (*William N. Dunn - (2003), n.d.*) yang mempunyai enam indikator yaitu meliputi *Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Pemerataan, Responsivitas, Ketepatan* indikator ini dianggap sebagai tolak ukur dalam Evaluasi Pemberdayaan Usaha. Dari enam indikator ini dapat

disimpulkan bahwa dari setiap indikator teori (*William N. Dunn - (2003), n.d.*) sudah dijalankan meskipun hasilnya belum maksimal.

- a) Efektivitas, pada faktor temuan yang ada program ini sudah berjalan akan tetapi belum berjalan secara merata, seperti bantuan yang diberikan oleh Kelurahan belum merata hanya orang-orang tertentu yang mendapatkannya.
- b) Efisiensi, pada faktor temuan yang ada membuktikan bahwa efisiensi menjadi faktor yang sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan program, tetapi program ini tidak berjalan secara optimal karena kurangnya komunikasi atau koordinasi antar instansi sehingga program ini tidak berjalan sesuai yang diinginkan.
- c) Kecukupan, yang menjadi hambatan pada faktor ini adalah kurangnya pengetahuan dan modal dari pihak pemilik UMKM sehingga perlu adanya pelatihan dan bantuan dari pihak yang bersangkutan agar UMKM dapat berjalan sesuai yang diinginkan.
- d) Perataan, pemberdayaan UMKM di Kelurahan Petemon menunjukkan bahwa masih terdapat ketidak merataan dalam distribusi bantuan. Beberapa faktor yang menyebabkan hal ini termasuk pihak Kelurahan yang kurang aktif dalam monitor perkembangan UMKM dan jumlah UMKM yang sangat banyak
- e) Responsivitas, pemberdayaan UMKM di Kelurahan Petemon adalah bahwa kemampuan pihak kelurahan untuk merespon kebutuhan dan tantangan UMKM masih kurang optimal. Beberapa hambatan yang diidentifikasi termasuk proses pendataan yang memakan waktu, keterbatasan sumber daya, serta kurangnya penyampaian informasi menyeluruh kepada pelaku UMKM.
- f) Ketepatan, meskipun telah diupayakan sesuai dengan kebijakan pemberdayaan UMKM untuk membantu pertumbuhan perekonomian dan mengurangi kemiskinan, namun implementasinya masih perlu diperbaiki. Beberapa hal yang telah dilakukan termasuk sosialisasi, pendataan ulang, dan bantuan terkait perizinan. Namun, masih terdapat ketidak merataan dalam pelaksanaan program, banyak pedagang yang belum menerima bantuan karena kurangnya sosialisasi yang efektif.

Saran

Berdasarkan temuan penelitian mengenai Evaluasi Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Sebagai Upaya Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Kelurahan Petemon Kecamatan Sawahan Kota Surabaya Berikut adalah saran yang dapat diberikan peneliti:

1. Kelurahan harus memberikan bantuan secara merata kepada pihak UMKM dan memberikan pelatihan tambahan kepada pihak UMKM.

2. Pihak kelurahan harus sering berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak UMKM seperti memberikan informasi terkait UMKM.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur saya haturkan kehadiran Allah SWT, yang selalu melimpahkan kemudahan dan menyertai di setiap proses pelaksanaan skripsi ini sehingga saya sebagai penulis dapat menyelesaikan rangkaian skripsi dengan baik dan lancar. Dalam penyusunan artikel ini, tentu saja terdapat bimbingan, masukan maupun kritik dari berbagai pihak. Oleh karena itu saya sebagai penulis mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada:

1. Bapak Achluddin Ibnu Rochim selaku Dosen Pembimbing pertama.
2. Ibu Indah Murti selaku Dosen Pembimbing kedua yang telah membimbing saya dalam proses penyelesaian skripsi.
3. Informan-informan yang terlibat pada penelitian.
4. Diri saya sendiri yang dapat menyelesaikan rangkain penelitian skripsi dengan baik dan maksimal.

DAFTAR REFERENSI

Daerah, P. (2021). Salinan Walikota Surabaya Provinsi Jawa Timur.

Dunn, W. N. (2003). (n.d.).

Rahmat, D., Yang, T., & Esa, M. (2008). UU No. 20. 1.

Sulastri. (2022). Peran penting UMKM dalam ancaman isu resesi. Retrieved from <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-balikpapan/baca-artikel/15677/Peran-Penting-UMKM-dalam-Ancaman-Isu-Resesi.html>

Surabaya. (2022). Dari program UMKM hingga padat karya. Retrieved from <https://www.surabaya.go.id/id/berita/65672/dari-program-umkm-hingga-padat>